

# LAPORAN KINERJA (LKJ)

TRIWULAN I

▶ 2021

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2021. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan terselenggaranya *good governance* di lingkup UPT Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2021. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindaklanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2021.

Saran dan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan laporan ke depan sangat kami harapkan, dan tidak lupa disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Bitung, 12 April 2021

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber  
Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



Donny M. Hamad Faisal, S.St.Pi, S.Pi, M.Si  
NIP. 19790502 200212 1 001

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan I tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2021.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2021 terdapat 7 Sasaran Kegiatan dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 7 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2021 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)) adalah 111,51 % Indikator Kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021, 8 Indikator Kinerja dapat tercapai (Hijau) dan 12 Indikator Kinerja belum dapat di nilai karena baru akan di ukur capaian kinerjanya pada Triwulan II dan Triwulan IV tahun 2021.

Secara umum target kinerja pada Triwulan I tahun 2021 dapat tercapai semuanya, dan mendapatkan nilai yang sama dengan target bahkan ada yang melebihi dari target pada Triwulan I. Sehingga nilai capaian kinerja pada triwulan I Pangkalan PSDKP Bitung mendapatkan hijau semua.

Pencapaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 dilaksanakan melalui 5 Kegiatan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu: Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan (2350), Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (2351), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353), dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2355). Pagu alokasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 sebesar Rp41,2 miliar dengan realisasi anggaran pada Triwulan I tahun 2021 Rp8,07 miliar atau 19,55%.

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan I tahun 2021 kiranya mampu menggambarkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2021 beserta capaiannya baik kinerja maupun anggaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai masukan dalam pelaksanaan kegiatan ke depan.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Isu Strategis	1
1.4 Tugas dan Fungsi	2
1.5 Sistematika Penyajian	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2019-2024	8
2.2 Rencana Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2021	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	12
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2021	15
3.2 Analisis Capaian Kinerja	18
3.3 Akuntabilitas Anggaran	42
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Rekomendasi	43

## LAMPIRAN

# DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021	12
Tabel 2	Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2021	15
Tabel 3	Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I 2021	18
Tabel 4	Rincian Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2021	19
Tabel 5	Hasil pengawasan Unit Usaha yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak Triwulan I tahun 2021 lingkup Pangkalan Bitung	27
Tabel 6	Capaian Kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2021	29
Tabel 7	Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2021	33
Tabel 8	Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya bukan melalui Simwaskan (Manual) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2021	33
Tabel 9	Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Triwulan I Tahun 2021	36
Tabel 10	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2021	37
Tabel 11	Penanganan TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan I Tahun 2021	39
Tabel 12	Penanganan Barang Bukti TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan I Tahun 2021	40
Tabel 13	Penanganan AWAK KAPAL di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan I Tahun 2021	41
Tabel 14	Realisasi Anggaran Per Kegiatan Triwulan I Tahun 2021	45

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung	4
Gambar 2	Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	5
Gambar 3	Peta Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang	20

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan I Tahun 2021 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawas SDKP Bitung untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan *“good governance”*.

### 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Triwulan I tahun 2021 kepada para stakeholders guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

### 1.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yaitu:

1. Isu strategis bidang perikanan tangkap, meliputi
  - a. Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi.
  - b. Isu pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII), antara lain: penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, penggunaan ABK asing, kelengkapan ijin operasi dan lain sebagainya.
2. Isu strategis bidang perikanan budidaya, meliputi:
  - a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.
  - b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut.
  - c. Penggunaan Obat Ikan, Kimia dan Bahan biologi (OIKB) dalam pembudidayaan ikan.
3. Isu strategis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:
  - a. Pelaksanaan ekspor hasil perikanan Indonesia harus sesuai dengan ketentuan internasional dan regional.
  - b. Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, borax dan bahan berbahaya lainnya dalam produk hasil perikanan.
4. Isu strategis bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
  - a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan stroom.
  - b. Eksploitasi mangrove.
  - c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

Selain isu strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas, SDM juga menjadi isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan rentang kendali yang luas meliputi seluruh Pulau Sulawesi, dukungan Pengawas Perikanan yang terbatas menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Wilker Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.

#### **1.4. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan



Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

a. Kepala Pangkalan

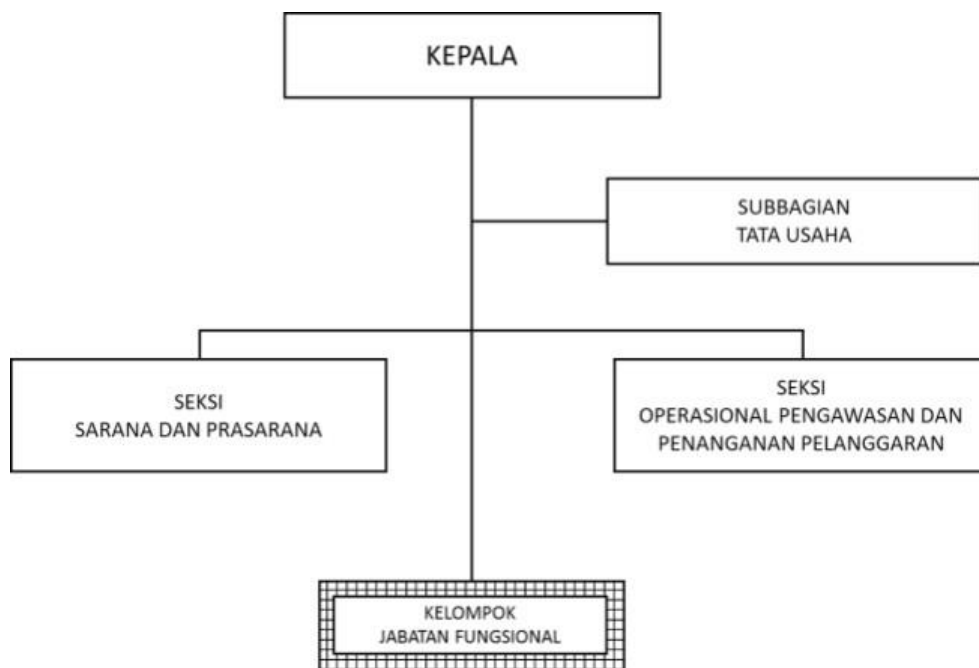
Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Subbagian Tata Usaha

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

- c. Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran  
Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.
- d. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana  
Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional  
Fungsional pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung



Kepala Pangkalan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengenai hasil pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT PSDKP maupun dalam hubungan antar instansi



Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara efektif, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dibantu oleh 6 Satuan Pengawasan SDKP 31 Wilayah Kerja PSDKP, dengan rincian :

- a. **Pangkalan PSDKP Bitung**, meliputi: Wilker PSDKP Amurang, Wilker PSDKP Belang, Wilker PSDKP Labuan Uki, Wilker PSDKP Kema, Wilker PSDKP Tumumpa, dan Wilker PSDKP Sitaro.
- b. **Satwas SDKP Gorontalo**, meliputi: Wilker PSDKP Molibago, Wilker PSDKP Parigi Moutong, Wilker PSDKP Tojo Una-una, Wilker PSDKP Boalemo, dan Wilker PSDKP Pohuwato.
- c. **Satwas SDKP Kendari**, meliputi: Wilker PSDKP Banggai, Wilker PSDKP Banggai Kep. dan Banggai Laut, Wilker PSDKP Bau-bau, Wilker PSDKP Ereke, Wilker PSDKP Kolaka, Wilker PSDKP Pasar Wajo, Wilker PSDKP Torobulu, dan Wilker PSDKP Wakatobi.
- d. **Satwas SDKP Gorontalo Utara**, meliputi: Wilker PSDKP Toli-toli.
- e. **Satwas SDKP Makassar**, meliputi: Wilker PSDKP Bone, Wilker PSDKP Palopo, dan Wilker PSDKP Pangkajene Kepulauan.
- f. **Satwas SDKP Takalar**, meliputi: Wilker PSDKP Bulukumba, Wilker PSDKP Jeneponto, Wilker PSDKP Selayar, dan Wilker PSDKP Sinjai.
- g. **Satwas SDKP Mamuju**, meliputi: Wilker PSDKP Donggala, Wilker PSDKP Majene, Wilker PSDKP Mamuju Utara, dan Wilker PSDKP Polewali Mandar.

## 1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I tahun 2021 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di susun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi serta isu strategis organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
2. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021;
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi uraian hasil pengukuran kinerja,

evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2021; dan

4. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2021 dan rekomendasi perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2019-24 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis KKP sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020 - 2024.

#### Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen PSDKP

##### 1. Visi

“Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab”

##### 2. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan SDKP melalui pengawasan partisipatif.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

##### 3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi Direktorat Jenderal PSDKP sekaligus penterjemahan tujuan di dalam Renstra KKP 2020-2024 maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal PSDKP akan sangat berkaitan dengan salah satu aspek pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu aspek kedaulatan (sovereignty) dengan fokus pada: “Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

##### 4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2019-2024 melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan *balanced scorecard (BSC)* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan

pengukuran kinerja. Pada pendekatan *logical model*, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit Eselon I) yang menghasilkan hasil (outcome), dan sasaran kegiatan (unit Eselon II) yang menghasilkan keluaran (output).

Jika menggunakan pendekatan tersebut maka sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu:

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP; dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif

Di sisi lain, pendekatan *balanced scorecard* (BSC) adalah suatu konsep manajemen dalam pengukuran kinerja secara terukur (kuantitatif), utuh dan seimbang pada berbagai perspektif, jangka waktu, dan ruang lingkup. Sasaran pada pendekatan ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learn and growth perspective*. Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan BSC maka sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Stakeholder perspective: "Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan".
- b. Customer perspective: "Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan".
- c. Internal Process perspective
  - 1) Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif;
  - 2) Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif.
- d. Learning and growth perspective
  - 1) Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang profesional dan berintegritas;
  - 2) Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses;
  - 3) Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
  - 4) Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel.

## 5. Peta Strategi dan Sasaran Strategis

Peta strategi merupakan sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi organisasi. Peta strategi memberikan gambaran visual dari strategi organisasi sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi memiliki beberapa perspektif, yaitu suatu cara pandang untuk mengelola kinerja organisasi. Perspektif yang digunakan dalam BSC KKP yaitu:

### a. *Perspektif Stakeholder*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *stakeholder*. Yang dimaksud dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi.

### b. *Perspektif Customer*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *Customer*. *Customer* (pengguna layanan) adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi.

### c. *Perspektif Internal Process*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi, untuk memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (value chain).

### d. *Perspektif Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sasaran strategis merupakan deskripsi lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Sasaran strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan penjabaran visi dan misi Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024, yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan target kinerja tahun 2021 yang telah ditentukan sebelumnya.

## 2.2. Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun



2021 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, dengan lingkup Kegiatan, meliputi:

1. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
  - a. Pengawasan dan Pengendalian Kelompok Masyarakat
  - b. Operasi Kapal Pengawas
  - c. Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
  - d. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat
  - e. Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi
2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
  - a. Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tingkat Daerah
  - b. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
  - a. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
  - b. Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya.
  - c. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
  - d. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
  - e. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya
  - f. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak
4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
  - a. Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
  - b. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
  - c. Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya
  - d. Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang diperiksa kepatuhannya
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
  - a. Layanan Perkantoran
  - b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
  - c. Layanan Umum
  - d. Layanan Sarana Internal
  - e. Layanan SDM
  - f. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pengelolaan kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen PSDKP, juga ditujukan untuk: menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi; membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinous improvement*); dan Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Target kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 sebagaimana tabel Perjanjian Kinerja dibawah ini:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	71
4.	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	1,79
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	0,82

5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP Bitung	6. Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
		7. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	8. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		9. Persentase Penyelesaian Penanganan Barang bukti dan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	10. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80
		11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80
		12. Nilai WBK lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	75
		13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	73
		14. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	90
		15. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (inovasi)	1
		16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	72.5
		17. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	72.5
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	84
		19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	89
20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	86		

## 2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (*Raw Data*)  
Perhitungan data mentah perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.
2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan obyektif.
5. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).
6. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI *gaming*).
7. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi *Aplikasi Kinerjaku* yang merupakan *aplikasi* berbasis informasi teknologi.

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan I Tahun 2021 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)) adalah 111,51. Terdapat 20 Indikator Kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021, 8 Indikator Kinerja dapat tercapai (Hijau) dan 12 Indikator Kinerja belum dapat di ukur karena baru akan diukur capaian kinerjanya pada Triwulan berikutnya ditahun 2021. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021, sebagaimana yang ada pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Validasi	Target (Tahun)	Target TW I	Capaian TW I	%
1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	IKS.01.01	Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	95	50	100	120
2	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	IKS.02.01	Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	100	100	100	100
3	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	IKS.03.01	Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lead Proses	71	71	71	100
4	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	IKS.04.01	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	1,79	0,27	0,88	120

5	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	IKS.04.02	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	0,82	0,09	0,09	100
6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	IKS.05.01	Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	100	0	0	
7	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	IKS.05.02	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	100	0	0	
8	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	IKS.06.01	Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	93	35	96,8	120
9	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	IKS.06.02	Persentase Penyelesaian Penanganan Barang bukti dan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	93	10	93,07	120
10	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.01	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	INDEKS	Maximize	Lag Outcome	80	0	0	
11	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.02	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	INDEKS	Maximize	Lag Outcome	80	0	0	
12	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.03	Nilai WBK lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	Lag Output	75	0	0	
13	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.04	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	Lag Output	73	0	0	
14	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.05	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	Lag Output	90	0	0	

15	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.06	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	INOVASI	Maximize	Lead input	1	0	0	
16	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.07	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	72,5	0	0	
17	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.08	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	72,5	0	0	
18	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.09	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	Lag Output	84	84	100	119,05
19	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	Lag Output	89	0	0	
20	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	IKS.07.11	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	Lag Output	86	0	0	

(kinerjaku.kkp.go.id tanggal 14 April 2021)

Warna	Keterangan
Baik	>= 100
Cukup	70 - < 100
Kurang	<70
Belum ada penilaian	
Belum Input Capaian	

Dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan I tahun 2021, telah dilakukan pengukuran terhadap 8 (delapan) indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang capaiannya >=100% target kinerja pada Triwulan I, dan 12 (dua belas) indikator kinerja Pangkalan PSDKP Bitung belum dilaksanakan pengukuran capaiannya.

Capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan I tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2019. Capaian kinerja Triwulan I tahun 2020 adalah 99,61% mengalami kenaikan menjadi 111,51% pada Triwulan I tahun 2021.

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis terhadap pencapaian kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan di masing-masing Indikator Kinerja, bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan, disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja, sekaligus mencoba membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Analisis capaian kinerja tahun 2019 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung diuraikan sebagai berikut:

#### Sasaran Kegiatan 1:

#### ***Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan***

Capaian Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan didukung dengan IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan capaian pada Triwulan I tahun 2021 adalah 120%.

#### **IKU1 PRESENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Target penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan pada Triwulan I tahun 2021 adalah 50%, tercapai 100% dengan presentase capaian kinerja 120% (Hijau). Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 948.000.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp 21.811.300 realisasi anggaran sampai dengan TW I adalah 2,30%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SK-1 sebesar 99,98% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-1 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-1 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

Tabel 3. Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I 2021

Indikator Kinerja	Satuan	2021	
		Target	Realisasi



Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	persentase	50%	100%
--	------------	-----	------

Capaian ini merupakan hasil agregasi capaian 6 (enam) kegiatan pengawasan, meliputi:

- Pengawasan pengelolaan jenis ikan yang dilindungi
- Pengawasan pengelolaan jasa kelautan
- Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan
- Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi
- Pengawasan *destructive fishing*

Tabel 4. Rincian Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Jumlah Lembaga yang diperiksa	Presentase Capaian Pemeriksaan Triwulan I
1.	Pengawasan pengelolaan jenis ikan yang dilindungi	1	100
2.	Pengawasan pengelolaan jasa kelautan	6	100
3.	Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	4	100
4.	Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan	10	100
5.	Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi	3	100
6.	Pengawasan <i>destructive fishing</i>	5	100
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung		<b>30 (Lembaga)</b>	<b>100</b>

Rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja di Triwulan I tahun 2021, sebagai berikut:

**1. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya**

Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung pada Triwulan I 2021 telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi yaitu pengawasan terhadap PT. Rohtadi yang merupakan unit usaha

pengolahan ikan (sirip hiu kering), unit usaha tersebut beralamat di Jln. Perkamil Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado - Sulawesi Utara. Pengawasan jenis ikan dilindungi di PT.Rohtadi meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan kesesuaian jenis usaha, hasil pemeriksaan terhadap PT. Rohtadi Dokumen perizinan lengkap dan sesuai, ikan olahan yang merupakan jenis ikan dilindungi secara terbatas sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh BKSDA.

Pangkalan PSDKP Bitung telah melakukan penanganan terhadap jenis ikan yang dilindungi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelepas liaran satu ekor penyu hijau (*Chelonia mydas*) pada tanggal 29 Januari 2021 di Kel.Lumpio, Kec.Banggai, Kab.Banggai Laut (Sulteng), penyu tersebut merupakan penyu yang diamankan pada tanggal 28 Januari 2021 oleh personil Wilker PSDKP Banggai Kepulauan dan Banggai Laut dari atas Kapal Penumpang KM. Ridah. Hasil identifikasi terhadap penyu tersebut adalah Panjang 68 cm Lebar 43 cm selanjutnya dilakukan pelepas liaran terhadap penyu tersebut.
2. Penguburan satu ekor Dugong yang terdampar di Pantai Pakin Desa Sapa Timur Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan (Sulut) pada tanggal 7 Maret 2021. Berawal dari informasi dimedia sosial FB yang sudah viral melalui akun bernama Swingly J Ransalele bahwa adanya mamalia laut terdampar dalam keadaan mati dan membusuk di pesisir pantai Pantai Pakin Desa Sapa Timur Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan. Kemudian Polsus PWP3K Wilker PSDKP Amurang berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makasar melalui Wilker Manado dan kemudian secara bersama melakukan evakuasi untuk dikuburkan. Hasil identifikasi adalah sebagai berikut :
  - a. Jenis Kelamin : Jantan
  - b. Panjang Total : 280 cm
  - c. Panjang Hingga Pangkal Ekor : 242 cm
  - d. Panjang Siri Dada : 33 cm
  - e. Diameter Tubuh : 219,8 cm
  - f. Lebar Ekor : 92 cm
  - g. Panjang Klasper : 33 cm
  - h. Kondisi : Mati
3. Pelepas liaran empat ekor penyu hijau (*Chelonia mydas*) oleh personil Wilker PSDKP Tojo Una-una pada tanggal 12 Maret 2021. Penyu tersebut merupakan hasil sitaan dari masyarakat pada tanggal 11 Maret 2021 selanjutnya dilakukan koordinasi dengan BKSDA Sulteng untuk dilakuka identifikasi dan pelepas liaran terhaap keempat penyu tersebut. Diketahui keempat penyu tersebut berjenis kelamin betina

yang memiliki panjang 30-35 cm dan lebar 40-45 cm semuanya dalam kondisi hidup. Kegiatan pelepas liaran keempat penyu hijau tersebut dihadiri oleh Plh. Bupati Tojo Una-Una bersama instansi terkait.

4. Pelepas liaran 1 ekor Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan 1 ekor Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricate*) oleh personil Wilker PSDKP Bangkeplut bekerjasama bersama Pokmas Coral Fish dan Kokoila Bangkit pada tanggal 16 Maret 2021, kedua ekor penyu tersebut merupakan penyu yang terjerat oleh pukat milik nelayan setempat. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap kedua jenis penyu tersebut dengan hasil sebagai berikut Panjang 57 cm dan 70 cm Lebar 36 cm dan 47 cm kondisi hidup. Selanjutnya kedua ekor penyu tersebut dilepaskan keperairan Desa Padei Laut Kec.Menui Kepulauan, kegiatan ini sekaligus sebagai sarana sosialisasi agar masyarakat sadar dan tidak lagi melakukan penangkapan dan penyembelihan terhadap jenis ikan yang dilindungi yakni penyu.
5. Pelepas liaran 2 ekor Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan 2 ekor Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricate*) oleh personil Wilker PSDKP Bangkeplut pada tanggal 17 Maret 2021, keempat ekor penyu tersebut merupakan penyu yang diserahkan secara sukarela oleh Bapak Ferriyanto Tannus selaku pemilik UPI CV. C 99 kepada Wilker PSDKP Bangkeplut. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap keempat jenis penyu tersebut dengan hasil sebagai berikut Penyu Hijau 2 ekor Panjang 30 cm dan 52 cm Lebar 35 cm dan 38 cm kondisi Hidup, Penyu Sisik 2 ekor Panjang 56 cm dan 50 cm Lebar 45 cm dan 39 cm kondisi Hidup. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Perikanan Bangkeplut maka pada hari tersebut keempat penyu tersebut langsung dilepas liarkan keperairan Kel.Lumpio, Kec.Banggai, Kab.Banggai Laut (Sulteng).
6. Pelepas liaran 2 ekor Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricate*) oleh personil Wilker PSDKP Bulukumba pada tanggal 17 Maret 2021 ke perairan Hila Hila, Kel.Ekatiro, Kec. Bontotiro, Kab.Bulukumba (Sulsel) hasil idetifikasi terhadap kedua penyu tersebut adalah sebagai berikut: Jenis Penyu Sisik, Panjang 41 cm dan 41 cm Lebar 37 cm dan 37 cm kondisi hidup. Penyu tersebut merupakan penyu yang dijadikan objek wisata di pantai Hila-hila oleh Saudara Rahmat (Pengelola) hingga akhirnya penyu tersebut diserahkan ke Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Bulukumba untuk dilepas liarkan.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 62,500,000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp 700.000. realisasi anggaran sampai dengan TW I adalah 1,12%.

## 2. Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya

- a. Telah dilakukan pengawasan terhadap 2 (dua) pelaku usaha penambangan pasir laut di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, dengan rincian sebagai berikut:
  - Pengawasan terhadap pelaku usaha penambangan pasir laut PT. Kulaka Jaya Perkasa pada tanggal 10 Maret 2021 yang beralamat di Desa Bambakoro Kec. Lariang Kab. Pasangkayu Prov. Sulawesi Barat. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, perusahaan tersebut telah memiliki dokumen yang lengkap dan sesuai.
  - Pengawasan terhadap pelaku usaha penambangan pasir laut CV. Maju Bersama pada tanggal 15 Maret 2021 yang beralamat di Dusun Kalindu Desa Bambakoro Kec. Lariang Kab. Pasangkayu Prov. Sulawesi Barat. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, perusahaan tersebut telah memiliki dokumen yang lengkap dan sesuai.
- b. Telah dilakukan pengawasan terhadap 6 (enam) pelaku usaha wisata bahari di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, dengan rincian sebagai berikut:
  - Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 05 Februari 2021 di Tasik Ria Resort yang beralamat di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Jenis usaha wisata tirta/diving, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
  - Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 05 Februari 2021 di Murex Dive Resort yang beralamat di Desa Kalasey Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Jenis usaha Wisata Selam, Cottage, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
  - Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 18 Maret 2021 di Nusantara Dian Centre Resort and Spa yang beralamat di Jl. Raya Molas, Lingkungan 4, Molas, Bunaken, Kota Manado. Jenis usaha Perhotelan, snorkeling, Diving, boat tour, olahraga pantai, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
  - Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 18 Maret 2021 di Thalassa Resort and PADI Dive Center yang beralamat di Lingkungan I, Kel.Tongkaina, Kec.Bunaken. Jenis usaha Cottage, and diving, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar
  - Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 18 Maret 2021 di Grand Luley Hotel yang beralamat di Tongkeina, Kel. Tongkaina, Kec. Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara 1.5669230,124.9128510. Jenis usaha Hotel, snorkeling,

selam, renang, konservasi, mangrove, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

- Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 18 Maret 2021 di Starbright Garden Beach Resort yang beralamat di Desa Kima Bajo, Kab.Minahasa Utara Sulawesi Utara. Jenis usaha Cottage, rumah makan, diving, dan Spa, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 125,000,000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp 4.350.000, dan realisasi anggaran sampai dengan TW I adalah 3,48%.

### **3. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannyakepatuhannya**

Telah dilakukan pengawasan terhadap 4 (empat) unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut sampai dengan Triwulan I 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir

Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir pada tanggal 30 Maret 2021 di PT. Elnusa Petrofin yang beralamat di Desa Sapa barat, Kec.Tenga, Kab.Minahasa Selatan. Jenis usaha Penyimpanan bahan bakar gas, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

- Pengawasan unit usaha pengelolaan ruang laut nasional

Telah dilaksanakan pengawasan terhadap 3 (tiga) pelaku usaha pemanfaatan ruang laut nasional dilingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan I 2021 sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 01 Maret 2021 di PLTU Minahasa Cahaya Lestari yang beralamat di Desa Kema 1, Kecamatan Kema, Kab. Minahasa Utara. Jenis usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap, dokumen perizinan lengkap dan sesuai.
2. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 09 Maret 2021 di Janji laut resort tanawangko yang beralamat di Desa Tanawangko, Kec. Tombariri, Kab. Minahasa. Jenis usaha Diving and Resort, dokumen perizinan lengkap dan sesuai.
3. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 16 Maret 2021 di Mangatasik Villa yang beralamat di Desa Tanawangko, Kec. Tombariri, Kab. Minahasa. Hasil pemeriksaan dilapangan villa ini merupakan villa pribadi yang

tidak dikomersilkan, dan pihak pengelola tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 135,000,000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp1.720.000, realisasi anggaran sampai dengan TW I adalah 1,27%.

#### **4. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya**

Hasil kegiatan pada triwulan I 2021 ini telah dilaksanakan pengawasan terhadap 10 (sepuluh) unit usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan CV. Prima Indo Tuna pada tanggal 04 Februari 2021 yang beralamat di Jl. Ir. Sutami No. 32 Kota Makassar 5°05'11"S 119°29'23"E. Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
- b. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Bahari Inti Lestari pada tanggal 11 Februari 2021 yang beralamat di Jl. KIMA 12 KAV 5C Makassar/ 5°06'25"S 119°30'20"E. Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
- c. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Dwira Masagena pada tanggal 12 Februari 2021 yang beralamat di Jl. Kima Raya 1 Kav B 5 Makassar 5°06'08"S 119°29'50"E. Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
- d. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT Nichindo Manado Suisan pada tanggal 24 Februari 2021 yang beralamat di Kelurahan Pondang, Kec. Amurang Timur, Kab. Minahasa Selatan. Telah memiliki dokumen perizinan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).
- e. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Parlevliet Paraba Seafood pada tanggal 03 Maret 2021, hasil pemeriksaan hanya ada rekomendasi dan dokumen UKL/UPL untuk kegiatan pembangunan gudang pengepakan dan penyimpanan ikan. Telah memiliki dokumen perizinan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).
- f. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Deho Canning Company pada tanggal 15 Maret 2021 yang beralamat di Kelurahan Madidir, Kota Bitung. Telah memiliki dokumen perizinan berupa Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
- g. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Ocean Champ Seafood pada tanggal 23 Maret 2021 yang beralamat di Jl. KIMA 7 Kav J-2 Kota Makassar 5°05'58"S 119°30'14"E. Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-

UPL dan Izin Lokasi.

- h. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Kemilau Bintang Timur pada tanggal 24 Maret 2021 yang beralamat di Jl. KIMA 3 Kav. 2-A Makassar/5°06'32"S 119°30'18"E. Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
- i. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Wahyu Pradana Binamulia pada tanggal 25 Maret 2021 yang beralamat di J Jl. KIMA RAYA XT-2B Kawasan Industri Makassar/ 5°06'26"S 119°29'57"E. Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
- j. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Dunia Marine Products pada tanggal 23 Maret 2021, yang beralamat di Jl. KIMA 3 Kav. 48 Kawasan Industri Makassar/ 5°06'25"S 119°30'22"E. Telah memiliki dokumen perizinan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).

Pada tanggal 22-23 Maret 2021 Pangkalan PSDKP Bitung telah melakukan Pulbaket di Desa Dumoga Kec. Dumoga Raya Kab. Bolaang Mongondow terkait dengan adanya aduan masyarakat di media sosial tentang dugaan adanya pencemaran perairan umum di sungai Ongkang yang menyebabkan kematian ikan secara masal.

Pulbaket dilaksanakan dengan mendatangi lokasi serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan melakukan penggalian data terhadap masyarakat sekitar sungai Ongkang. Dugaan sementara dari tim Dinas Lingkungan Hidup serta Polres Kab. Bolang Mongondow pencemaran berasal dari aktifitas penambangan emas masyarakat yang mengolah hasil tambang menggunakan arsenik dan merkuri yang kemudian masuk ke badan perairan sungai Ongkang, untuk mengetahui penyebab pastinya, tim akan melakukan uji lab terhadap kualitas air.

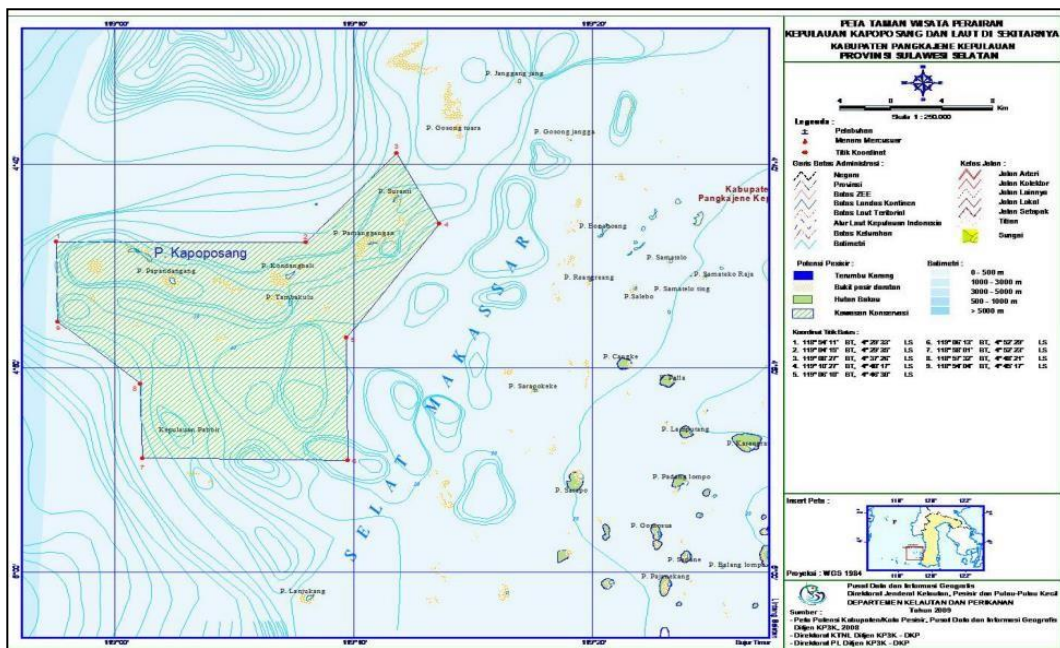
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 158.000.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp1.640.000, realisasi anggaran sampai dengan TW I adalah 1,04%.

#### **5. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya**

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP memiliki target 17 (tujuh belas) kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1) Taman Wisata Perairan Gili Matra (NTB); 2) Taman Nasional Perairan Laut Sawu (NTT); 3) Taman Wisata Perairan Kapoposang (Selawesi Selatan); 4) Taman Wisata Perairan Pulau Pieh (Sumatera Barat); 5) Taman Wisata Perairan Anambas (Kepulauan Riau); 6) SAP Raja Ampat (Papua Barat); 7) SAP Waigeo (Papua Barat); 8) SAP Aru Bagian Tenggara (Maluku); 9) Taman Wisata

Perairan Padaido (Papua); 10) Taman Wisata Laut Banda (Maluku); 11) Taman Nasional Karimun Jawa ; 12) Taman Nasional Laut Bunaken; 13) Taman Nasional Laut Wakatobi; 14) Taman Nasional Laut Takabonerate; 15) Taman Nasional Teluk Cendrawasih; 16) Taman Nasional Laut Togean; dan 17) Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Angka 1 s/d 10 merupakan kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan angka 11 s/d 17 merupakan kawasan konservasi yang menurut rencana akan diserahkan pengelolaannya oleh Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Gambar 3. Peta Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang



Pengawasan kawasan konservasi perairan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 47 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.

TWP Kapoposang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan berada di WPP 713 dan EL 8 dengan luasan 50.000 ha, dasar hukum pengelolaan di atur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 66 tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009, TWP Kapoposang telah dialihkan ke KKP dengan BA Nomor: BA.01/Menhut-IV/2009 dan Nomor: BA.108/ Men.KP/III/2009. Potensi TWP Kapoposang terdiri dari: terumbu Karang, ikan hias, penyu, molusca, lumba-lumba, vegetasi pantai dan mangrove, berbagai spot penyelaman, penyu.



Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi taman wisata perairan Kapoposang pada triwulan I telah dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 3 pelaku usaha sebagai berikut:

1. Kapal Jaya Bersama Matalaang No. BPKP : 45.20.7398.199.00202 masa berlaku sampai dengan 25 Oktober 2021, dilakukan pemeriksaan di Taka Palleleko (4°51'12.80"BT 118°59'1.98"LS). Kapal yang diperiksa telah memiliki Surat BPKP (Bukti Pencatatan Kapal Perikanan) tetapi belum memiliki surat TDKPI (Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan) kapal tersebut direkomendasikan untuk mengurus Surat TDKPI kepada UPT Pengelola Kawasan Konservasi TWP Kep. Kapoposang.
2. Kapal Bintang Mandiri MTL No. BPKP : 45.20.7398.199.00185 masa berlaku sampai dengan 8 November 2021, dilakukan pemeriksaan di Taka Palleleko (4°51'9.51"BT 118°59'31.87"LS). Kapal yang diperiksa telah memiliki Surat BPKP (Bukti Pencatatan Kapal Perikanan) tetapi belum memiliki surat TDKPI (Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan) kapal tersebut direkomendasikan untuk mengurus Surat TDKPI kepada UPT Pengelola Kawasan Konservasi TWP Kep. Kapoposang.
3. Kapal Irma Indah MTL No. SIPI : 26.20.7398.199.01592 masa berlaku sampai dengan 29 September 2021, dilakukan pemeriksaan di Taka Palleleko (4°50'44.06"BT 118°59'23.04"LS). Kapal tersebut telah memiliki SIPI (surat izin penangkapan ikan).

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 340.000.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp 90.000, realisasi anggaran sampai dengan TW I adalah 0.03%.

#### 6. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Hasil kegiatan pengawasan di Triwulan I tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil pengawasan Unit Usaha yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak Triwulan I tahun 2021 lingkup Pangkalan Bitung.

No	Pelaku Usaha	Waktu Pengawasan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Hasil Pengawasan
1.	KM. Tanpa Nama (LK Mudding)	05-06 Februari 2021	Penangkapan Ikan	Perairan Pulau Dua Laut	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
2	KM. Tanpa Nama (LK Jumasri alias MABE)	05-06 Februari 2021	Penangkapan Ikan	Perairan Pulau Tiga	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

3	KM. Tanpa Nama (LK. Anwar alias Allo)	05-06 Februari 2021	Penangkapan Ikan	Perairan Pulau Tiga	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
4	KM. Tanpa Nama (LK. Manir)	05-06 Februari 2021	Penangkapan Ikan	Perairan Pulau Tiga	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
5	KM. Tanpa Nama (ANDI bin ARIADI)	02-03 Maret 2021	Penangkapan Ikan	Perairan Tanjung Harapan	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

Empat kapal yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak telah diperiksa, diamankan dan dibawa ke Satwas PSDKP Kendari untuk diserahkan ke PPNS PSDKP Bitung untuk proses hukum lebih lanjut, sementara satu kapal diamankan dan dibawa ke Wilker PSDKP Morowali untuk diproses hukum lebih lanjut.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 127.500.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp 13.311.300, realisasi anggaran sampai dengan TW I adalah 10,44%.

### **Sasaran Kegiatan 2:**

#### **Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan**

Capaian Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan di dukung dengan IKU 2 Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan capaian pada Triwulan I tahun 2021 adalah 100%.

#### **IKU2 PRESENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Capaian kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2021 dari target 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100% (Hijau). IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun sebelumnya. Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 1.671.149.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp 47.155.100 realisasi anggaran sampai dengan TW I adalah 2,82%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SK-2 sebesar 99,97% atau dapat disimpulkan bahwa

penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-2 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-2 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

*Tabel 6. Capaian Kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2021*

Indikator Kinerja	Satuan	2021	
		Target	Realisasi
Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	persentase	100%	100%

Capaian IKU ini diperoleh dari hasil agregasi capaian 4 (empat) kegiatan pengawasan sumber daya perikanan, yaitu:

- Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya.
- Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya.
- Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya.
- Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya.

Hasil capaian Triwulan I tahun 2021 keempat kegiatan pengawasan tersebut, sebagai berikut:

#### **1. Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya**

Pada Triwulan I tahun 2021 telah dilakukan kegiatan pemeriksaan kapal laik operasi terhadap 25 Unit pengolahan ikan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dengan tingkat presentase penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan 100%.

Telah dilakukan pengawasan terhadap 25 (dua puluh lima) unit usaha pengolahan hasil perikanan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

- PT. Carvinna Trijaya Makmur dengan alamat Jl. Arnoldus Sompotan, Kelurahan Aertembaga I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, jenis produk Ikan kaleng dan ikan tuna beku.
- PT. Sari Tuna Makmur dengan alamat Kompleks PPS Bitung, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, jenis produk Ikan segar dan beku.
- PT. Blue Ocean Grace International dengan alamat Kompleks PPS Bitung, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, jenis produk ikan Tuna beku.
- PT. Bintang Mandiri bersaudara dengan alamat Jl. Insinyur Sutami No.32, Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk Ikan segar dan beku.

- CV. Prima Indo Tuna dengan alamat Jl. Insinyur Sutami No.32, Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk ikan segar dan beku.
- PT. Prima Bahari Inti Lestari dengan alamat Jl. Kima Raya I No.12, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk ikan beku.
- PT. Dwira Masagena dengan alamat Jl. Kapasa Raya No.24, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk ikan beku.
- PT. Chen Woo Fishery dengan alamat Jl. Worang By Pass, Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, jenis produk Ikan beku dan ikan segar.
- CV. Momar Biru Sejahtera dengan alamat Jl. Poros Lasalimu, Kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, jenis produk ikan beku.
- CV. Golden KK dengan alamat Jalan Baru Tugu Adipura, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, jenis produk ikan segar.
- PT. Palma Marinaio Nusantara dengan alamat Kompleks PPS Bitung, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, jenis produk ikan segar.
- PT. Samudra Mandiri Sentosa dengan alamat Jl. Wolter Monginsidi KM. 5 Wangurer, Kel. Wangurer Timur, Kec. Madidir, Kota Bitung, jenis produk Tuna kaleng, tuna loin, tuna pouch dan tepung ikan.
- PT. Deho Canning Company dengan alamat Jl. Raya Madidir RT.21 Lingk. VI, Kel. Paceda, Kec. Madidir Kota Bitung, jenis produk Tuna kaleng, tuna segar, tuna beku, dan ikan nike beku.
- PT. Kemilau Bintang Timur dengan alamat Jl. Kima III No.Kav.2A, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk Ikan beku, daging rajungan pasteurisasi.
- PT. Sinar Pure Foods International dengan alamat Jl. Raya Madidir, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir Kota Bitung, jenis produk ikan kaleng.
- UD. Rainbow Grace Fisheries dengan alamat Lingkungan II, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, jenis produk Tuna beku dan tuna segar.
- PT. Barumbun Jaya dengan alamat Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, jenis produk ikan beku.
- PT. Etmieco Sarana Laut dengan alamat Jl. Samuel Languyu No. 8A, Kelurahan Aertembaga I, Lingkungan II Kota Bitung, jenis produk ikan kayu.
- PT. Etmieco Makmur Abadi dengan alamat Jl. Samuel Languyu No. 8A, Kelurahan Aertembaga I, Lingkungan II Kota Bitung, jenis produk ikan beku.
- CV. Indotropic Fishery dengan alamat Jl. Raya KM. 9, Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, jenis produk ikan beku.

- PT. Ocean Champ Seafood dengan alamat Jl. Kima VII/ Kav. J-2, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk Daging rajungan pasteurisasi.
- PT. Wahyu Pradana Binamulia dengan alamat Jl. Kima Raya XT - 2 B, Kawasan Industri Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk Ikan beku, ikan segar, telur ikan terbang kering.
- PT. Parlevliet Paraba Seafood dengan alamat Jl. Jembatan Tua No. 89, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, jenis produk ikan segar dan ikan beku.
- UD. Berdikari dengan alamat Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, jenis produk ikan beku.
- CV. Sakura Prima dengan alamat Dusun Naukkaluku, Desa Lalattedong, Kec. Sendana, Kab. Majene, Sulawesi Barat, jenis produk ikan beku.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 349,292,000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp 3.500.000, realisasi anggaran sampai dengan TW I adalah 1,00%.

## **2. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya**

Telah dilakukan pengawasan terhadap 7 (tujuh) unit usaha pembudidaya ikan, dengan hasil presentase pemeriksaan kegiatan capaian 100% dengan rincian sebagai berikut:

- PT. Dwira Masagena yang beralamat di Jl. Kapasa Raya No.24, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk tuna beku dengan tujuan ekspor negara Jepang melalui kapal laut/container.
- PT. Blue Ocean Grace International dengan alamat Kompleks PPS Bitung, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, jenis produk tuna beku dengan negara tujuan ekspor Amerika Serikat melalui kapal laut/container.
- PT. Carvinna Trijaya Makmur dengan alamat Jl. Arnoldus Sompotan, Kelurahan Aertembaga I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, jenis produk Ikan cakalang loin masak beku, negara tujuan ekspor Thailand melalui kapal laut/container.
- PT. Prima Bahari Inti Lestari dengan alamat Jl. Kima Raya I No.12, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk Gurita beku dengan negara tujuan ekspor Prancis melalui kapal laut/container.
- PT. Wahyu Pradana Binamulia dengan alamat Jl. Kima Raya XT - 2 B, Kawasan Industri Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk Gurita beku dengan negara tujuan ekspor Cyprus melalui kapal laut/container.

- PT. Parlevliet Paraba Seafood dengan alamat Jl. Jembatan Tua No. 89, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, jenis produk tuna beku dengan negara tujuan ekspor Jepang melalui kapal laut/container.
- PT. Palma Marinaio Nusantara dengan alamat Kompleks PPS Bitung, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, jenis produk tuna segar dengan negara tujuan ekspor Jepang melalui pesawat.
- PT. Kemilau Bintang Timur dengan alamat Jl. Kima III No.Kav.2A, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk rajungan beku dengan negara tujuan ekspor Amerika Serikat melalui kapal laut/container.
- PT. Delta Pasific Indotuna dengan alamat Jl. Veteran, Girian Bawah, Lingkungan IV, Kecamatan Girian Kota Bitung, jenis produk ikan kaleng dengan negara tujuan ekspor Yaman melalui kapal laut/container.
- PT. Banggai Indo Gemilang dengan alamat JL. Raya Kilongan KM.5, Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, jenis produk Gurita beku dengan negara tujuan ekspor Amerika Serikat melalui kapal laut/container.
- CV. Indotropic Fishery dengan alamat Jl. Raya KM. 9, Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, jenis produk Gurita beku dengan negara tujuan ekspor Amerika Serikat melalui kapal laut/container.
- UD. Rainbow Grace Fisheries dengan alamat Lingkungan II, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, jenis produk tuna segar dengan negara tujuan ekspor Jepang melalui Pesawat.
- PT. Sinar Pure Foods International dengan alamat Jl. Raya Madidir, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir Kota Bitung, jenis produk ikan tuna dalam kaleng dengan negara tujuan ekspor Australia melalui kapal laut.
- PT. Deho Canning Company dengan alamat Jl. Raya Madidir RT.21 Lingk. VI, Kel. Paceda, Kec. Madidir Kota Bitung, jenis produk tuna beku dengan negara tujuan ekspor Amerika melalui kapal laut/container.
- PT. Ocean Champ Seafood dengan alamat Jl. Kima VII/ Kav. J-2, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk rajungan beku dengan negara tujuan Amerika Serikat melalui kapal laut.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 183,857,000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp14.478.700, realisasi anggaran sampai dengan TW I adalah 7,87%.

### **3. Unit Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya**

Pada Triwulan I tahun 2021 telah dilakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan

>10 GT terhadap 4.813 Unit kapal perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung melalui aplikasi Simwaskan maupun belum menggunakan Simwaskan, pemeriksaan kapal perikanan melalui Simwaskan adalah 1.874 unit kapal perikanan, sedangkan yang belum menggunakan Simwaskan adalah 2.942 Unit kapal perikanan. dengan tingkat presentase penyelesaian pemeriksaan kapal perikanan 100%. Berdasarkan manual IKU pemeriksaan kapal perikanan yang masuk dalam hitungan capaian IKU ini adalah kapal perikanan >10 GT, sehingga kapal perikanan <10 GT yang telah diperiksa kepatuhannya tidak dimasukkan sebagai capaian IKU.

Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung belum seluruhnya menerapkan pelayanan kapal perikanan melalui aplikasi Simwaskan karena terkendala jaringan internet di beberapa Wilker PSDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Berikut ini adalah pemeriksaan kapal perikanan melalui Simwaskan dan yang belum menggunakan Simwaskan:

*Tabel 7. Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya melalui Simwaskan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2021*

No	UPT/Satwas/Wilker	Kapal Perikanan yang diperiksa Kepatuhannya Melalui Simwaskan
1	Pangkalan PSDKP Bitung	479
2	Satwas SDKP Gorontalo Utara	34
3	Satwas SDKP Gorontalo	111
4	Satwas SDKP Kendari	330
5	Satwas SDKP Makassar	102
6	Satwas SDKP Takalar	201
7	Wilker PSDKP Selayar	8
8	Wilker PSDKP Sinjai	448
9	Wilker PSDKP Tumumpa	118
	<b>Jumlah</b>	<b>1871</b>

*Tabel 8. Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya bukan melalui Simwaskan (Manual) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2021*

No.	UPT/SATWAS/WILKER PSDKP	Kapal Perikanan yang Diperiksa Bukan Melalui Simwaskan (manual)
1	<b>Pangkalan PSDKP Bitung</b>	549
2	Wilker PSDKP Amurang	8
3	Wilker PSDKP Belang (Mitra)	58
4	Wilker PSDKP Labuan Uki	37

5	Wilker PSDKP Kema (Minut)	39
6	Wilker PSDKP Tumumpa	121
7	<b>Satwas. SDKP Gorontalo Utara</b>	36
8	Wilker PSDKP Toli-toli	7
9	<b>Satwas. SDKP Gorontalo</b>	111
10	Wilker PSDKP Molibagu	22
11	Wilker PSDKP Parigi Moutong	14
12	Wilker PSDKP Tojo Una-una	21
13	Wilker PSDKP Boalemo	27
14	Wilker PSDKP Pohuwato	8
15	<b>Satwas. SDKP Kendari</b>	339
16	Wilker PSDKP Banggai	9
17	Wilker PSDKP Banggai Keplut	38
18	Wilker PSDKP Bau-bau	24
19	Wilker PSDKP Kolaka	4
20	Wilker PSDKP Pasar Wajo	22
21	Wilker PSDKP Torobulu	4
22	Wilker PSDKP Wakatobi	35
23	<b>Satwas. SDKP Makassar</b>	141
24	Wilker PSDKP Bone	173
25	Wilker PSDKP Palopo	14
26	<b>Satwas. SDKP Takalar</b>	222
27	Wilker PSDKP Bulukumba	105
28	Wilker PSDKP Selayar	7
29	Wilker PSDKP Sinjai	611
30	<b>Satwas. SDKP Mamuju</b>	40
31	Wilker PSDKP Donggala	69
32	Wilker PSDKP Majene	18
33	Wilker PSDKP Mamuju Utara	3
34	Wilker PSDKP Polman	6
<b>Jumlah Unit Kapal Perikanan</b>		<b>2.942</b>

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 657,000,000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp24.176.400, realisasi anggaran sampai dengan TW I adalah 3,68%.

#### 4. Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya

Telah dilakukan pengawasan terhadap 7 (tujuh) unit usaha pembudidayaan ikan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

- Pokdakan Gift Nusantara yang beralamat di Desa Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, jenis usaha pembesaran dan pembenihan ikan lele komoditas air tawar menggunakan jaring tancap, hasil pengawasan unit usaha ini telah memiliki dokumen perizinan.



- Muksin Usman memiliki unit usaha budidaya yang beralamat di Desa Mootinelo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, jenis usaha budidaya air payau pembesaran udang vaname, menggunakan tambak sebagai lahan budidaya, hasil pemeriksaan dilapangan unit usaha budidaya tersebut belum memiliki dokumen perizinan.
- Sain Djonga memiliki unit usaha budidaya yang beralamat di Desa Leboto, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, jenis usaha budidaya pembesaran udang vaname menggunakan sistem tambak. Hasil pemeriksaan dilapangan unit usaha budidaya tersebut belum memiliki dokumen perizinan.
- Hamid Mbuinga memiliki unit usaha budidaya yang beralamat di Desa Alata Karya, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara. Jenis usaha budidaya air payau pembesaran udang vaname sistem tambak. Hasil pemeriksaan dilapangan, unit usaha budidaya ini belum memiliki dokumen perizinan.
- Samin Djonga memiliki unit usaha budidaya yang beralamat Desa Leboto, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara. Jenis usaha budidaya air payau pembesaran udang vaname menggunakan sistem tambak. Hasil pemeriksaan dilapangan, unit usaha budidaya ini belum memiliki dokumen perizinan.
- PT. Arta Samudra merupakan unit usaha budidaya mutiara yang beralamat di Kelurahan Tandurusa, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, jenis usaha budidaya mutiara menggunakan sistem *longline*, PT. Arta Samudra selain melakukan pembesaran tiram mutiara juga melakukan pembenihan. Hasil pemeriksaan dilapangan, unit usaha budidaya ini telah memiliki dokumen perizinan dari instansi terkait.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 481,000,000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp5.000.000, realisasi anggaran sampai dengan TW I adalah 1,04%.

### **Sasaran Kegiatan 3:**

#### **Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat**

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat didukung oleh IKU Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

#### **IKU3 PERSENTASE TINDAK LANJUT INFORMASI/ADUAN POKMASWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Capaian IKU ini diukur pada setiap Triwulan tahun 2021. Pangkalan PSDKP Bitung belum melaksanakan tindak lanjut terhadap aduan kelompok masyarakat, namun capaian pada iku ini bisa terealisasi dan dianggap memenuhi target jika tidak ada

pengaduan dari kelompok masyarakat pengawas. Sehingga capaian kinerja untuk IKU ini dianggap memenuhi target IKU 71% dan capaian kinerja 100%.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 12.600.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp 0.

**Sasaran Kegiatan 4:  
Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP**

IKU Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: 1) IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 2) IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

**IKU4 PERSENTASE CAKUPAN WPPNRI YANG DIPANTAU KAPAL PENGAWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Capaian kinerja IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2021 dari target 0.27% tercapai 0.88% dengan persentase capaian kinerja 120% (Hijau). Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 9.674.713.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp 2.419.560.900 realisasi anggaran sampai dengan TW I adalah 25,01%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SK-4 sebesar 99,92% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-4 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-4 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

*Tabel 9. Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Triwulan I Tahun 2021*

UPT PSDKP	Kapal Pengawas	Total Hari	Jam Operasi (jam) (t)	Kecepatan Dinas (NM/jam) (V)	Jangkauan Efektif Radar (NM) (d)	Faktor Koreksi WPP (Fwpp)	Faktor Koreksi Kapal (Fkp)	Cakupan (Xkp) NM2 (d.V.t.Fwpp. Fkp)	% Cakupan
Pangkalan PSDKP Bitung	Hiu 02	40	471,05	15	15	0,40	0,20	8.478,90	0,44%
	Hiu 05	50	467	15	15	0,40	0,20	8.406,00	0,44%
<i>Persentase capaian Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Triwulan I Tahun 2021</i>									<b>0,88 %</b>

**IKU5 PERSENTASE CAKUPAN WPP NRI YANG DIPANTAU SPEED BOAT/RIGID**

## INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. pada Triwulan I tahun 2021 dari target 0.09% tercapai 0.09% dengan persentase capaian kinerja 100% (Hijau). Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 2.732.184.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp 125.847.970 realisasi anggaran sampai dengan TW I adalah 4,61%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SK-2 sebesar 99,95% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-4 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-4 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

*Tabel 10. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2021*

No.	NAMA KAPAL	Jangkauan Pemantauan Visual (NM)	Kecepatan (NM/Jam)	Hari Operasi (hari)	Lama Waktu Pengawasan (jam)	Faktor Koreksi Speedboat (Fsb)	Cakupan (Xsb) (NM2)	Luas WPP NRI (NM2)	Cakupan (%)
		d	v		t	Fsb	d*v*t*Fsb	A	X/A
1	Albacore 01	4	10	17	82	0,1	328	1.928.506	0,0170%
2	Dolphin 03	4	10	7	38	0,1	152	1.928.506	0,0079%
3	Dolphin 19	4	10			0,1	0	1.928.506	0,0000%
4	Dolphin 26	4	10	10	50	0,1	200	1.928.506	0,0104%
5	Napoleon 30	4	10	10	60	0,1	240	1.928.506	0,0124%
6	Napoleon 31	4	10			0,1	0	1.928.506	0,0000%
7	Napoleon 56	4	10			0,1	0	1.928.506	0,0000%
8	RHIB/Sea Rider 06	4	10	5	25	0,1	100	1.928.506	0,0052%
9	Rubber Boat Bone	4	10			0,1	0	1.928.506	0,0000%
10	Rubber Boat Kendari	4	10	10	54	0,1	216	1.928.506	0,0112%
11	Rubber Boat Luwuk Banggai	4	10			0,1	0	1.928.506	0,0000%
12	Rubber Boat Mamuju Utara	4	10	5	27	0,1	108	1.928.506	0,0056%
13	Rubber Boat Pangkejene Kepulauan	4	10	10	51	0,1	204	1.928.506	0,0106%
14	Rubber Boat Selayar	4	10	7	35	0,1	140	1.928.506	0,0073%
15	Rubber Boat Takalar	4	10			0,1	0	1.928.506	0,0000%
16	Rubber Boat Wakatobi	4	10			0,1	0	1.928.506	0,0000%
				<b>81</b>	<b>422</b>				<b>0,09%</b>

**Sasaran Kegiatan 5 :  
Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana  
Pengawasan SDKP**

Capaian Sasaraan Kegiatan 5 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP di dukung dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: IKU Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dan IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

**IKU6 PERSENTASE PENYELESAIAN PEMBANGUNAN PRASARANA  
PENGAWASAN SDKP LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021 belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini, capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2021.

**IKU7 PERSENTASE PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN  
LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021 belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini, capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2021.

**Sasaran Kegiatan 6:**

**Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan**

**IKU8 PERSENTASE PENYELESAIAN PENYIDIKAN TPKP LINGKUP PANGKALAN  
PSDKP BITUNG**

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung telah menangani 15 Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. 3 (tiga) Perkara sudah dinyatakan Inkracht, 6 (enam) Perkara Tahap II, 4 (empat) Perkara P21 dan 2 (dua) Perkara dalam proses penyidikan. Capaian kinerja untuk IKU ini adalah 96,80% dari target kinerja 35 % di Triwulan I sehingga nilai capaian kinerja untuk IKU ini adalah 120% (Hijau). Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 554.000.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp 153.102.000 realisasi anggaran sampai dengan TW I adalah 27,64%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SK-6 sebesar 99,90% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-6 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-6 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

Tabel 11. Penanganan TKPK di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan I Tahun 2021





NO	NAMA TERSANGKA	PROSES HUKUM	NOMOR SPRINDIK	TANGGAL SPRINDIK	NOMOR SPDP	TANGGAL SPDP	TANGGAL PENYERAHAN BERKAS KE JPU	NOMOR P-21	TANGGAL P-21	Tahap II	TANGGAL TAHAP II
1	AL IMRAN	Inkracht	Print.Sidik.01/PPNS - Lan.5/PW.510/XII/2020	17 Desember 2020	1846/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	Tanggal 22 Desember 2020	13 Januari 2021	B-117/P.4.4/Ek u.1/01/2021	20 Januari 2021	121/Lan.5/PW.510/I/2021	20 Januari 2021
2	RIKIANTO	Inkracht	Print.Sidik.02/PPNS - Lan.5/PW.510/XII/2020	18 Desember 2020	1846/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	Tanggal 22 Desember 2020	13 Januari 2021	B-124/P.4.4/Ek u.1/01/2021	20 Januari 2021	122/Lan.5/PW.510/I/2021	20 Januari 2021
3	ARDIANSYAH	Inkracht	Print.Sidik.03/PPNS - Lan.5/PW.510/XII/2020	18 Desember 2020	1846/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	Tanggal 22 Desember 2020	13 Januari 2021	B-123/P.4.4/Ek u.1/01/2021	20 Januari 2021	123/Lan.5/PW.510/I/2021	20 Januari 2021
4	RAHMAN alias JUMRIN	TAHAP II	Print.Sidik.04/PPNS - Lan.5/PW.510/II/2021	03 Pebruari 2021	7/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	Tanggal 04 Pebruari 2021	15 Pebruari 2021	B-510/P.3.4/Ek u.1/02/2021	25 Pebruari 2021	505/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
5	SUDIRMAN alias DIRMAN	TAHAP II	Print.Sidik.05/PPNS - Lan.5/PW.510/II/2021	03 Pebruari 2021	7/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	Tanggal 04 Pebruari 2021	15 Pebruari 2021	B-509/P.3.4/Ek u.1/02/2021	25 Pebruari 2021	506/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
6	MUDDING	TAHAP II	Print.Sidik.06/PPNS - Lan.5/PW.510/II/2021	09 Pebruari 2021	226/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	Tanggal 10 Pebruari 2021	25 Pebruari 2021	B-563/P.3.4/Ek u.1/03/2021	04 Maret 2021	510/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
7	JUMASRI Alias MABE	TAHAP II	Print.Sidik.07/PPNS - Lan.5/PW.510/II/2021	09 Pebruari 2021	227/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	Tanggal 10 Pebruari 2021	25 Pebruari 2021	B-565/P.3.4/Ek u.1/03/2021	04 Maret 2021	508/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
8	ANWAR Alias ALO	TAHAP II	Print.Sidik.08/PPNS - Lan.5/PW.510/II/2021	09 Pebruari 2021	228/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	Tanggal 10 Pebruari 2021	25 Pebruari 2021	B-561/P.3.4/Ek u.1/03/2021	04 Maret 2021	509/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
9	M A N I R	TAHAP II	Print.Sidik.09/PPNS - Lan.5/PW.510/II/2021	09 Pebruari 2021	229/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	Tanggal 10 Pebruari 2021	25 Pebruari 2021	B-560/P.3.4/Ek u.1/03/2021	04 Maret 2021	507/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
10	BADWI	P21	Print.Sidik.10/PPNS - Lan.5/PW.510/III/2021	01 Maret 2021	471/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 02 Maret 2021	12 Maret 2021	B-577/P.2.4/Ek u.2/03/2021	29 Maret 2021	-	-
11	MOHAMAD	P21	Print.Sidik.11/PPNS - Lan.5/PW.510/III/2021	01 Maret 2021	472/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 02 Maret 2021	12 Maret 2021	B-580/P.2.4/Ek u.2/03/2021	29 Maret 2021	-	-
12	ANAS alias MOHAMAD ALANG	P21	Print.Sidik.12/PPNS - Lan.5/PW.510/III/2021	01 Maret 2021	473/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 02 Maret 2021	12 Maret 2021	B-579/P.2.4/Ek u.2/03/2021	29 Maret 2021	-	-
13	ANDI bin ARIADI	P21	Print.Sidik.13/PPNS - Lan.5/PW.510/III/2021	06 Maret 2021	505/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 06 Maret 2021	12 Maret 2021	B-578/P.2.4/Ek u.2/03/2021	29 Maret 2021	-	-
14	KAPTO KAILI	Penyidikan	Print.Sidik.14/PPNS - Lan.5/PW.510/III/2021	26 Maret 2021	681/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 26 Maret 2021	-	-	-	-	-
15	IKBAL K	Penyidikan	Print.Sidik.15/PPNS - Lan.5/PW.510/III/2021	26 Maret 2021	681/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 26 Maret 2021	-	-	-	-	-



## IKU9 PERSENTASE PENYELESAIAN PENANGANAN BARANG BUKTI DAN AWAK KAPAL LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Telah dilakukan penanganan barang bukti dan awak kapal di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan triwulan I 2021 sebanyak 11 Barang Bukti Kapal Perikanan dan 32 Awak Kapal dengan capaian persentase IKU ini adalah 93,63 % dari target triwulan I

10 % sehingga nilai capaian kerja IKU ini adalah 120 % (Hijau). Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 336.640.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2021 adalah Rp 36.000.000 realisasi anggaran sampai dengan TW I adalah 10,69%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SK-6 sebesar 99,99% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-2 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-6 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

Tabel 12. Penanganan Barang Bukti TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan I Tahun 2021

NO.	FOTO BARANG BUKTI	NAMA BARANG BUKTI		NAMA TERSANGKA	PROSES HUKUM (*)				LOKASI & KONDISI BARANG BUKTI		KETERANGAN
		KAPAL		NAMA	PENYIDIKAN	P-21	TAHA P II	INKRAKHT	LOKASI	KONDISI (**)	
		NAMA	GT								
1		Tanpa Nama	1	AL IMRAN				√	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung	Baik	Di kembalikan ke pemilik
2		KMN. INKAMINA-222/ TRIPLE 2	30	Rahman alias Jumrin & SUDIRMAN alias DIRMAN				√	Kolam labuh PPS Kendari	Baik	
3		Tanpa Nama	1	Mudding				√	Kolam labuh PPS Kendari	Baik	
4		Tanpa Nama	1	Jumasri alias Mabe				√	Kolam labuh PPS Kendari	Baik	
5		Tanpa Nama	1	Manir				√	Kolam labuh PPS Kendari	Baik	
6		Tanpa Nama	1	Anwar alias Allo				√	Kolam labuh PPS Kendari	Baik	
7		KM. Kemitraan Daerah Tertinggal 01/ KPDT Kendari 01	37	Badwi				√	TPI MATANO, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali	Baik	

8		KM. Tomini Sejahtera	20	Mohamad	√				TPI MATANO, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali	Baik	
9		KM. Inka Mina - 742	34	Anas Bin Mohammad Alang	√				TPI MATANO, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali	Baik	
10		Perahu Motor Tanpa Nama	1	Andi Bin Ariadi	√				TPI MATANO, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali	Baik	
11		Perahu Motor Tanpa Nama		Kapto Kaili & Ikbal	√				Kantor Wilker PSDKP Tojo Una-una	Baik	

Tabel 13. Penanganan AWAK KAPAL di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan I Tahun 2021

No	NAMA KAPAL	NAMA AWAK KAPAL	JABATAN	WARGA NEGARA	NOMOR SPRINDIK	TANGGAL SPRINDIK	NOMOR SPDP	TANGGAL SPDP	TANGGAL PENYERAHAN BERKAS KE JPU	NOMOR P-21	TANGGAL P-21	Tahap II	TANGGAL TAHAP II
1	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	AL IMRAN	Pemilik	INDONESIA	Print.Sidik.01/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	17 Desember 2020	1846/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	Tanggal 22 Desember 2020	13 Januari 2021	B-117/P.4.4/Ek u.1/01/2021	20 Januari 2021	121/Lan.5/PW.510/I/2021	20 Januari 2021
2		RIKIANTO	ABK	INDONESIA	Print.Sidik.02/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	18 Desember 2020	1846/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	Tanggal 22 Desember 2020	13 Januari 2021	B-124/P.4.4/Ek u.1/01/2021	20 Januari 2021	122/Lan.5/PW.510/I/2021	20 Januari 2021
3		ARDIANSYAH	ABK	INDONESIA	Print.Sidik.03/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	18 Desember 2020	1846/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	Tanggal 22 Desember 2020	13 Januari 2021	B-123/P.4.4/Ek u.1/01/2021	20 Januari 2021	123/Lan.5/PW.510/I/2021	20 Januari 2021
4	KM. INKAMINA 222/TRIPLE 2	RAHMAN alias JUMRIN	NAHK ODA	INDONESIA	Print.Sidik.04/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	03 Februari 2021	7/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	Tanggal 04 Februari 2021	15 Februari 2021	B-510/P.3.4/Ek u.1/02/2021	25 Februari 2021	505/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
5		SUDIRMAN alias DIRMAN	Penanggung Jawab	INDONESIA	Print.Sidik.05/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	03 Februari 2021	7/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	Tanggal 04 Februari 2021	15 Februari 2021	B-509/P.3.4/Ek u.1/02/2021	25 Februari 2021	506/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
6		TISON	KKM	INDONESIA									
7		ACO DILA HAPA	ABK	INDONESIA									
8		ABDUL MALIK UTULI	ABK	INDONESIA									
9		RUSTAM	ABK	INDONESIA									
10		RIZAL PRADITIA	ABK	INDONESIA									
11		HAENDRA WAHYUDI R.	ABK	INDONESIA									
12	SHARUDIN SALAWALI	ABK	INDONESIA										

Dikembalikan ke pihak keluarga

13		KAISAR	ABK	INDONESIA									
14		RIDWAN UTULI	ABK	INDONESIA									
15		ZUL FAHRIN	ABK	INDONESIA									
16		HENDRA GUNAWAN	ABK	INDONESIA									
17		FAISAL ADRIMAN MAHAUDIN	ABK	INDONESIA									
18		INDRAWAN	ABK	INDONESIA									
19		ARIF	ABK	INDONESIA									
20		TAKWA	ABK	INDONESIA									
21		ARIFIN T. RACHMAN	ABK	INDONESIA									
22		AMAN PAKAYA	ABK	INDONESIA									
23	PERAHU TANPA NAMA	MUDDING	NAHK ODA	INDONESIA	Print.Sidik.06/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	09 Februari 2021	226/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	Tanggal 10 Februari 2021	25 Februari 2021	B-563/P.3.4/Ek u.1/03/2021	04 Maret 2021	510/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
24		JUMASRI	ABK	INDONESIA	Print.Sidik.07/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	09 Februari 2021	227/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	Tanggal 10 Februari 2021	25 Februari 2021	B-565/P.3.4/Ek u.1/03/2021	04 Maret 2021	508/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
25		ANWAR alias ALO	ABK	INDONESIA	Print.Sidik.08/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	09 Februari 2021	228/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	Tanggal 10 Februari 2021	25 Februari 2021	B-561/P.3.4/Ek u.1/03/2021	04 Maret 2021	509/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
26		MANIR	ABK	INDONESIA	Print.Sidik.09/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	09 Februari 2021	229/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	Tanggal 10 Februari 2021	25 Februari 2021	B-560/P.3.4/Ek u.1/03/2021	04 Maret 2021	507/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
27	KM. KEMITRAN DAERAH TERTINGAL 01/KPDT KENDARI 01	BADWI	NAHK ODA	INDONESIA	Print.Sidik.10/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	01 Maret 2021	471/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 02 Maret 2021	12 Maret 2021	B-577/P.2.4/Ek u.2/03/2021	29 Maret 2021	-	-
28	KM. TOMINI SEJAHTERA	MOHAMAD	NAHK ODA	INDONESIA	Print.Sidik.11/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	01 Maret 2021	472/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 02 Maret 2021	12 Maret 2021	B-580/P.2.4/Ek u.2/03/2021	29 Maret 2021	-	-
29	KM. INKA MINA 742	ANAS BIN MOHAMMAD ALANG	NAHK ODA	INDONESIA	Print.Sidik.12/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	01 Maret 2021	473/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 02 Maret 2021	12 Maret 2021	B-579/P.2.4/Ek u.2/03/2021	29 Maret 2021	-	-
30	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	ANDI bin ARIADI	NAHK ODA	INDONESIA	Print.Sidik.13/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	06 Maret 2021	505/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 06 Maret 2021	12 Maret 2021	B-578/P.2.4/Ek u.2/03/2021	29 Maret 2021	-	-
31	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	KAPTO KAILI	Pemilik	INDONESIA	Print.Sidik.14/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	26 Maret 2021	681/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 26 Maret 2021	-	-	-	-	-
32		IKBAL K	ABK	INDONESIA	Print.Sidik.15/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	26 Maret 2021	681/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	Tanggal 26 Maret 2021	-	-	-	-	-



## **Sasaran Kegiatan 7:**

### **Tata kelola pemerintahan yang baik**

Capaian Sasaran Kegiatan 7 Tata kelola pemerintahan yang baik di dukung dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, yaitu, dengan rincian sebagai berikut:

#### **IKU10 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN SLO (SURAT LAIK OPERASI) KAPAL PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, pengukuran IKU TW I 2021 akan dilakukan pada TW II 2021.

#### **IKU11 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN LVHPI (LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENANGKAPAN IKAN) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, pengukuran IKU TW I 2021 akan dilakukan pada TW II 2021.

#### **IKU12 NILAI WBK LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, pengukuran IKU ini akan dilakukan pada TW IV 2021.

#### **IKU13 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, pengukuran IKU ini akan dilakukan pada Semester I 2021.

#### **IKU14 NILAI REKONSILIASI KINERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021.

#### **IKU15 INOVASI GUGUS KERJA TRANSFORMASI YANG DIHASILKAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021.

#### **IKU16 TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021..

#### **IKU17 TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021 .

### **IKU18 PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Capaian IKU ini di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan I tahun 2021 adalah 100%, dari target Triwulan I 2021 di Pangkalan PSDKP Bitung sebesar 82%, sehingga capaian kinerja pada IKU ini adalah 119,05 % (Hijau). Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 25.327.000 dan belum ada realisasi anggaran sampai dengan TW I. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SK-7 sebesar 100% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-7 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-7 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

### **IKU19 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan II tahun 2021.

### **IKU20 NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021.

### 3.3. Akuntabilitas Anggaran

Pagu anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 adalah Rp.45.404.975.000 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 18,22%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Triwulan I Tahun 2021

No	Kode   Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2350   Pemantauan , Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	20.904.139.000	3.549.838.480	16.98
2.	2351   Penyelesaian TPKP	890.640.000	179.064.338	20.11
3.	2352   Operasional Pengawasan SDK	948.000.000	27.391.300	2.89
4.	2353   Operasional Pengawasan SDP	1.671.149.000	47.005.100	2.81
5.	2355   Dukungan Manajemen	20.991.047.000	4.468.139.876	21.29
<b>Total</b>		<b>45,404,975,000</b>	<b>8,271,439,094</b>	<b>18,22</b>

# BAB 4

## PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 7 Sasaran Kegiatan dan 20 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2021 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)) adalah 111,51. 20 Indikator Kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021, 8 Indikator Kinerja dapat tercapai (Hijau) dan 12 Indikator Kinerja belum dapat di nilai karena baru akan di ukur capaian kinerjanya pada Triwulan II dan Triwulan IV tahun 2021. Target kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2021 dapat tercapai semuanya.

### 4.2. Rekomendasi

#### Saran

Dalam rangka perbaikan pencapaian indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2021, perlu dilakukan peningkatan terhadap capaian kinerja yang belum mencapai nilai maksimal, hal tersebut guna meningkatkan nilai capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.

#### Rencana Tindaklanjut

Melakukan perencanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja pada Triwulan II tahun 2021 secara terarah dan terukur.

# LAMPIRAN



## **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung  
Triwulan I Tahun 2021